

TESIS

**PERJANJIAN HIPOTEK KAPAL (STUDI
KOMPARATIF ANTARA INDONESIA DAN
AMERIKA SERIKAT)**



Diajukan Oleh:

SYARIFAH ZAHRA AL HADDAR

2420216320088

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
BANJARMASIN**

2026

**PERJANJIAN HIPOTEK KAPAL (STUDI KOMPARATIF ANTARA
INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT)**

Tesis

**Untuk memperoleh gelar Magister Dalam Program Magister Kenotariatan
Pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan Oleh:

SYARIFAH ZAHRA AL HADDAR

2420216320088

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
BANJARMASIN**

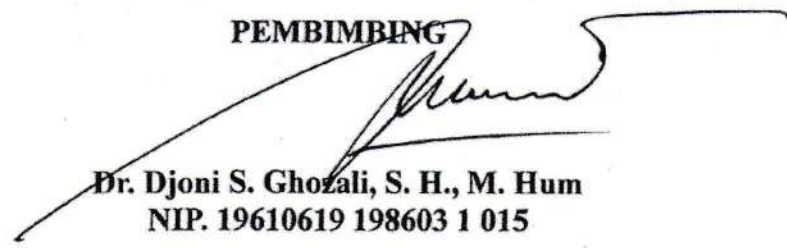
JULI 2026

Tesis Ini

telah diperbaiki dan disetujui

Pada Tanggal

PEMBIMBING



Dr. Djoni S. Ghozali, S. H., M. Hum
NIP. 19610619 198603 1 015

Diketahui oleh

Koordinator Program Studi

Megister Kenotariatan



Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

NIP. 197304202003122002

Diketahui oleh Dekan Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

NIP. 197805022001122002

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syarifah Zahra Al Haddar

NIM : 2420216320088

Program Studi : Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Tesis : Perjanjian Hipotek Kapal (Studi Komparatif Antara Indonesia dan Amerika Serikat)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila di kemudian hari diketahui tesis ini terbukti meniru atau menjiplak hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sebagai akibat dari perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 15 Juli 2026

Yang membuat pernyataan



Syarifah Zahra Al Haddar, S.H



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

diberikan kepada :

SYARIFAH ZAHRA AL HADDAR

NIM 2420216320088

**MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

Judul Tesis :

**PERJANJIAN HIPOTEK KAPAL (STUDI KOMPARATIF ANTARA INDONESIA
DAN AMERIKA SERIKAT)**

Telah dideteksi tingkat plagiasinya sebesar : 11%
sesuai dengan kriteria teloransi $\leq 20\%$ dan dinyatakan bebas plagiasi

Banjarmasin, 07 September 2026



Mengetahui,
Dekan
Dekan Bidang Akademik

Dr. H. Saprudin, S.H., LL.M.
NIP. 19820610 200501 1 002

*Koordinator Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa
Fakultas Hukum ULM*

Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

RINGKASAN

PERJANJIAN HIPOTEK KAPAL (STUDI KOMPARATIF ANTARA INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT)

Oleh:

Syarifah Zahra Al Haddar,¹ Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.²

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, ...

Halaman

Pengaturan hipotek kapal di Indonesia merupakan instrumen hukum yang berfungsi sebagai jaminan kebendaan dalam pembiayaan sektor maritim. Meskipun telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, masih terdapat berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kepastian hukum, terutama apabila dibandingkan dengan sistem hipotek kapal di Amerika Serikat. Perbedaan mendasar terlihat pada mekanisme pendaftaran, kedudukan kreditur, sistem prioritas klaim, dan pelaksanaan eksekusi hipotek kapal. Di Indonesia, hipotek kapal lahir melalui akta otentik dan pencatatan dalam register kapal nasional, sedangkan di Amerika Serikat dikenal konsep *preferred ship mortgage* yang memberikan perlindungan lebih kuat kepada kreditur melalui sistem federal yang terintegrasi. Selain itu, pengaturan mengenai hubungan antara hipotek kapal dan *maritime liens* di Indonesia belum diatur secara komprehensif sebagaimana dalam sistem hukum Amerika Serikat. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pengaturan hipotek kapal di Indonesia telah mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang efektif bagi para pihak dalam perjanjian pembiayaan kapal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis persamaan dan perbedaan pengaturan hipotek kapal di Indonesia dan Amerika Serikat serta menganalisis implikasi perbedaan mekanisme registrasi, prioritas klaim, dan eksekusi hipotek kapal terhadap kepastian hukum dan perlindungan kreditur. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum maritim, khususnya terkait jaminan kebendaan atas kapal, serta memberikan

¹ NIM: 2420216320088

² Pembimbing

masukan bagi pembentuk peraturan perundang-undangan dalam rangka penyempurnaan sistem hipotek kapal di Indonesia agar lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum bagi kreditur maupun debitur.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan hukum. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi KUHD, KUHPERdata, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, peraturan pelaksana di bidang pendaftaran kapal, Ship Mortgage Act, Commercial Instruments and Maritime Liens Act (CIMLA), serta regulasi U.S. Coast Guard. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, doktrin para ahli, dan literatur hukum maritim nasional maupun internasional. Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif dengan membandingkan kedua sistem hukum untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta kemungkinan penerapan praktik terbaik dalam rangka penguatan sistem hukum nasional.

Dalam sistem Indonesia, hipotek kapal berakar pada konsep hukum kebendaan yang bersumber dari KUHPERdata dan KUHD. Pembebanan hipotek dilakukan melalui akta otentik dan didaftarkan dalam register kapal Indonesia. Sistem ini masih menempatkan otoritas administrasi sebagai pihak yang berperan aktif dalam pembentukan dan pencatatan hak. Sebaliknya, dalam sistem Amerika Serikat, *preferred ship mortgage* dibentuk melalui perjanjian privat antara pemilik kapal dan kreditur, kemudian memperoleh kekuatan hukum setelah dicatat pada National Vessel Documentation Center (NVDC). Sistem federal tersebut memberikan transparansi yang lebih tinggi dan akses publik yang lebih luas terhadap data kapal dan hipotek.

Perbedaan berikutnya terlihat pada kedudukan kreditur dan sistem prioritas klaim. Di Indonesia, kreditur pemegang hipotek memperoleh hak preferen berdasarkan ketentuan hukum nasional, namun kedudukannya masih dapat dikalahkan oleh beberapa jenis piutang pelayaran tertentu. Di Amerika Serikat, *preferred ship mortgage* juga memiliki kedudukan prioritas, tetapi tetap tunduk pada *maritime liens* seperti upah awak kapal, salvage claims, dan klaim yang timbul dari perbuatan melawan hukum. Meskipun demikian, pengaturan mengenai urutan prioritas klaim di Amerika Serikat lebih rinci dan memberikan tingkat prediktabilitas yang lebih tinggi bagi para pihak. Yurisdiksi mahkamah pelayaran (*admiralty court*) Amerika Serikat dicirikan oleh fleksibilitas pragmatismenya, beroperasi secara independen dari batasan geografis yang tetap agar dapat berfungsi secara efektif di berbagai tempat. Sebaliknya, mahkamah pelayaran di Indonesia sangat terpusat, hanya terbatas pada pengadilan di Jakarta.

Perbedaan yang paling signifikan terdapat pada mekanisme eksekusi hipotek kapal. Sistem Indonesia memungkinkan pelaksanaan eksekusi melalui pengadilan maupun mekanisme *parate executie* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun dalam praktiknya, proses tersebut sering menghadapi hambatan administratif dan prosedural yang berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan kreditur. Sebaliknya, sistem Amerika Serikat mewajibkan pelaksanaan eksekusi melalui federal admiralty court dengan mekanisme *in rem action* terhadap kapal. Melalui *judicial sale*, seluruh beban dan klaim yang melekat pada kapal dapat dihapus sehingga pembeli memperoleh kapal dengan status hukum yang bersih. Mekanisme ini memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi, baik bagi kreditur maupun pihak ketiga.

Berdasarkan teori kepastian hukum Gustav Radbruch, teori hierarki norma Hans Kelsen, dan konsep real legal certainty Jan Michiel Otto, penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem hipotek kapal Amerika Serikat memberikan tingkat kepastian hukum yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Kepastian tersebut didukung oleh integrasi antara sistem registrasi federal, aturan prioritas klaim yang jelas, mekanisme penegakan *in rem*, dan konsolidasi yurisdiksi pada pengadilan federal. Sebaliknya, pengaturan di Indonesia masih menunjukkan fragmentasi norma dan belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan pembiayaan maritim modern yang bersifat lintas negara.

Oleh karena itu, diperlukan reformulasi regulasi hipotek kapal di Indonesia melalui penguatan sistem registrasi nasional, penyempurnaan pengaturan prioritas klaim, harmonisasi dengan praktik hukum maritim internasional, serta pembentukan mekanisme eksekusi yang lebih sederhana dan efektif. Dengan demikian, sistem hipotek kapal di Indonesia diharapkan mampu memberikan kepastian hukum yang lebih baik, meningkatkan perlindungan kreditur, dan mendukung pertumbuhan industri pelayaran serta pembiayaan maritim nasional.

PERJANJIAN HIPOTEK KAPAL (STUDI KOMPARATIF ANTARA INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT)

Oleh:

Syarifah Zahra Al Haddar¹, Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.²

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, ...

Halaman

ABSTRAK

Kata Kunci: *Hipotek Kapal, Kepastian Hukum, Perbandingan Hukum, Indonesia, Amerika Serikat*

Judul penelitian ini adalah *Perbandingan Pengaturan Hipotek Kapal di Indonesia dan Amerika Serikat dalam Menjamin Kepastian Hukum bagi Kreditur*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persamaan dan perbedaan pengaturan hipotek kapal di Indonesia dan Amerika Serikat serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan kreditur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Rumusan masalah pertama membahas persamaan dan perbedaan pengaturan hipotek kapal di kedua negara, meliputi dasar hukum, sistem registrasi, kedudukan kreditur, hak preferen, dan sifat hak jaminan atas kapal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua negara sama-sama mengakui kapal sebagai objek jaminan, mewajibkan pendaftaran hipotek, dan memberikan hak preferen kepada kreditur. Perbedaannya terletak pada mekanisme registrasi, pembentukan hak, dan pengaturan prioritas klaim. Indonesia mengatur hipotek kapal melalui KUHD, KUHPdata, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, sedangkan Amerika Serikat mengaturnya melalui Ship Mortgage Act dan Commercial Instruments and Maritime Liens Act (CIMLA). Rumusan masalah kedua membahas perbedaan mekanisme eksekusi hipotek kapal. Indonesia mengenal eksekusi melalui pengadilan maupun *parate executie*, sedangkan Amerika Serikat menerapkan *in rem action* melalui *federal admiralty court* yang berakhir dengan *judicial sale*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem Amerika Serikat memberikan kepastian hukum dan perlindungan kreditur

¹ NIM: 2420216320088

² Pembimbing

yang lebih kuat karena didukung registrasi federal yang terintegrasi, aturan prioritas klaim yang jelas, dan mekanisme penegakan yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem registrasi, pengaturan prioritas klaim, dan harmonisasi hukum maritim Indonesia dengan standar internasional.

SHIP MORTGAGE AGREEMENT (COMPARATIVE STUDY BETWEEN INDONESIA AND THE USA)

By:

Syarifah Zahra Al Haddar¹, Djoni Sumardi Gozali²
Master of Notary , Lambung Mangkurat University, 140 pages

ABSTRACT

Keywords: Ship Mortgage, Legal Certainty, Comparative Law, Indonesia, The USA

This study is aimed at analyzing the similarity and difference of regulations on ship mortgage between Indonesia and the USA and the implication on legal certainty and creditor's protection. Method of this study is normative legal research, the characteristic is prescriptive, with statute, conceptual, and comparative approaches. The first legal issue explores the similarity and difference of regulations on ship mortgage in both countries, covering legal grounds, registration system, creditor's position, preferend right, and characteristic of guarantee right of ship. The findings of the study indicate that both countries recognize ship as guarantee object, obligation to register mortgage, and provide preferend right to the creditor. The differences lie on the mechanism of registration, right formation, and regulation on priority of claim. Indonesia regulates ship mortgage in Commercial Code (KUHD), Civil Code (KUHPerdota), and Act Number 17 Concerning of 2008 concerning Shipping, while in the USA the regulations are through Ship Mortgage Act and Commercial Instruments and Maritime Liens Act (CIMLA). The second legal issue deals with the difference of mechanism of execution of ship mortgage. Indonesia applies execution through the court and *parate executie*, while the USA applies *in rem action* through federal admiralty court which ends with judicial sale. This research concludes that the system in the USA provides legal certainty and legal protection to the stronger creditor because it supported by integrated federal registration, clear regulation on claim priority, and effective mechanism of law enforcement. Therefore, we need strengthening of registration system, regulation on claim priority, and harmonization of Indonesian maritime law with international standard.

Certified by,



Drs. Werhan Asmin, S.H., M.H., M.Div
Authorized Sworn Translator

¹ Student Number : 2420216320088

² Supervisor

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik bagi seluruh umat manusia.

Karya ilmiah ini penulis persembahkan dengan penuh kasih sayang kepada:

1. Suamiku tercinta, Syarif Ali Al Qadri, yang senantiasa menjadi sumber kekuatan, tempat berbagi suka dan duka, serta pendamping terbaik dalam setiap perjalanan kehidupan dan perjuangan akademik penulis.
2. Ibunda tercinta, Hj. Fatimah, yang dengan kasih sayang, doa, dan pengorbanannya telah menjadi cahaya dan inspirasi dalam setiap langkah kehidupan penulis.
3. Almarhum Ayahanda Habib Hadi Al Haddar, *Al-Fatihah*, yang semasa hidupnya telah menanamkan nilai-nilai kehidupan, ilmu, dan keteladanan yang akan selalu menjadi pedoman bagi penulis. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan menempatkan beliau di tempat terbaik di sisi-Nya.
4. Buah hatiku, si kembar Syarifah Alara Sakinah Al Qadri dan Syarifah Azra Sukainah Al Qadri: Kehadiran dan senyum kalian adalah inspirasi serta motivasi terbesar bagi Mima untuk terus belajar dan meraih cita-cita. Semoga keberhasilan ini menjadi teladan kebaikan untuk masa depan kalian.
5. Dosen Pembimbing dan Penguji Tesis Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Djoni S. Gozali, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing, serta Bapak Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D. selaku dosen penguji. Atas segala bimbingan, arahan, dan nasihat berharga yang Bapak berikan, sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga keberhasilan ini menjadi langkah awal bagi penulis untuk terus berkontribusi bagi masyarakat, agama, nusa, dan bangsa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: **“Perjanjian Hipotek Kapal (Studi Komparatif antara Indonesia dan Amerika Serikat)”**. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.) pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan penyelesaiannya tidak terlepas dari bantuan, dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Bapak Dr. Djoni S. Gozali, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan arahan, bimbingan, masukan, serta motivasi kepada penulis selama proses penyusunan tesis ini.
4. Bapak Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D. dan Bapak Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat berharga demi penyempurnaan tesis ini.
5. Seluruh Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, serta pengalaman akademik selama masa perkuliahan.
6. Seluruh staf akademik dan administrasi Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu kelancaran proses studi penulis.
7. Suami tercinta, Syarif Ali Al Qadri, yang senantiasa memberikan cinta, doa, dukungan, dan semangat tanpa henti dalam setiap langkah kehidupan dan perjalanan akademik penulis.
8. Ibunda tercinta, Hj. Fatimah, atas segala kasih sayang, doa, pengorbanan, dan dukungan yang tiada henti kepada penulis.
9. Almarhum Ayahanda Habib Hadi Al Haddar, yang semasa hidupnya telah memberikan teladan, pendidikan, dan nilai-nilai kehidupan yang senantiasa menjadi pedoman bagi penulis.

10. Buah hati tercinta, Syarifah Alara Sakinah Al Qadri dan Syarifah Azra Sukainah Al Qadri, yang selalu menjadi sumber kebahagiaan, inspirasi, dan motivasi terbesar bagi penulis.
11. Seluruh keluarga, sahabat, rekan mahasiswa Magister Kenotariatan, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan doa selama proses penyelesaian studi ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki berbagai kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum jaminan dan hukum maritim, serta menjadi referensi bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Banjarmasin, 15 Juli 2026



Syarifah Zahra Al Haddar, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	v
RINGKASAN	v
ABSTRAK	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Tujuan Penelitian	14
E. Manfaat Penelitian	14
F. Tinjauan Pustaka	15
1. Kerangka Konseptual	15
2. Kerangka Teoritis	21

G. Metode Penelitian.....	25
1. Jenis Penelitian.....	25
2. Tipe Penelitian.....	27
3. Sifat Penelitian	28
4. Pendekatan Penelitian	30
5. Jenis Bahan Hukum.....	30
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	31
7. Pengelolaan dan Analisa Bahan Hukum	32
H. Sistematika Penelitian	33

BAB II PERSAMAAN DAN PERBEDAAN HUKUM HIPOTEK KAPAL DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT

A. Konsep Hipotek Kapal dalam Sistem Hukum Indonesia.....	35
1. Hipotek dalam KUHPerdara.....	35
2. Hipotek Kapal dalam KUHD	52
3. Hipotek Kapal dalam UU Pelayaran	55
4. Sistem Pendaftaran dan Akibat Hukum	59
B. Konsep Hipotek Kapal dalam Sistem Hukum Amerika Serikat	63
1. Sejarah <i>Ship Mortgage Act</i>	63
2. <i>Preferred Ship Mortgage</i>	67
3. Yurisdiksi <i>In Rem</i> (<i>In Rem Jurisdiction</i>).....	69
4. <i>Federal Admiralty System</i> (Sistem Admiralti Federal).....	71
5. Sistem <i>National Vessel Documentation Center</i> (NVDC)	73
C. Persamaan dan Perbedaan Hipotek Kapal Indonesia–AS.....	77

1. Persamaan Gagasan Hipotek Kapal di Indonesia dan Amerika Serikat	77
2. Perbedaan Gagasan Hipotek Kapal di Indonesia dan Amerika Serikat	84
 BAB III IMPLIKASI PERBEDAAN MEKANISME EKSEKUSI HIPOTEK KAPAL DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP KEPASTIAN HUKUM DI INDONESIA	
101	
A. Analisis Implikasi terhadap Kepastian Hukum.....	101
1. Analisis Kepastian Norma (Kelsen).....	102
2. Kepastian Perlindungan Kreditur (Radbruch).....	107
3. Kepastian Hukum yang Nyata (Otto).....	114
B. Rekomendasi Normatif	123
1. Harmonisasi Regulasi.....	124
2. Penguatan Sistem Registrasi	127
3. Reformulasi Mekanisme Eksekusi	129
 BAB IV PENUTUP	135
A. Kesimpulan	135
B. Saran.....	136
 DAFTAR PUSTAKA	139

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Persamaan dan Perbedaan Sistem Jaminan Hipotek di Indonesia dan Amerika Serikat	49
Tabel 2 Perbedaan Sistem Indonesia dan Amerika Serikat	51